

Promoting Religious Moderation, Focusing on
Education to Strengthen Social Stability in
Indonesia in the Context of COVID-19 -
CONVEY Indonesia

Policy Brief Series

Issue 4 | Vol. 5 | 2022

Policy Brief Series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

Penguatan Kapasitas Guru SMA/MA dalam Menangkal Disinformasi sebagai Usaha Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah dan Madrasah

(Studi Kasus dan Kegiatan *Capacity Building* di Delapan
SMA/MA di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan)

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)
UIN Jakarta

Pendahuluan

Sejak 2019, moderasi beragama sudah mulai dikampanyekan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu upaya dalam merawat keberagaman untuk mencegah semakin berkembangnya intoleransi dan ekstremisme di Indonesia. Moderasi beragama sendiri didefinisikan sebagai cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Kemenag RI, 2020: 16).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada peningkatan intoleransi dan ekstremisme terutama di kalangan pemuda. Pada tahun 2017, PPIM menemukan bahwa 51,1% siswa memiliki pandangan yang kurang toleran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50,1% siswa mengaku bahwa mereka mendapatkan pengetahuan keagamaan dari media sosial. Kemudian pada tahun 2019, PPIM juga menemukan bahwa siswa dan guru di SMA dan MA memandang information disorder di sosial media misalnya hoaks atau berita bohong adalah suatu ancaman. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan dalam situasi pandemi covid-19 dimana semua orang terpaksa harus melakukan setiap pekerjaan dari rumah tak terkecuali kegiatan pembelajaran bagi siswa. Akhirnya, interaksi fisik yang terbatas semakin membuat kita terekspos dalam waktu yang lebih lama pada media berbasis internet atau sosial media.

Selama masa pandemi, kasus ekstremisme kekerasan alih-alih turun, data malah menunjukkan sebaliknya. Salah satu peristiwa penyerangan yang ditengarai dilakukan kelompok teroris di Sigi, Sulawesi Tengah terjadi pada akhir November 2020 dan menewaskan empat orang warga (Antara, 2020). Selain itu, studi Institute for Policy Analysis for Conflict (IPAC) mengkonfirmasi bahwa sentimen anti-Cina dan ujaran kebencian

di media sosial yang berbasis pada sikap sentimen ras dan agama telah meningkat selama pandemi. Bahkan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 1.733 berita hoaks terkait Covid-19 dan vaksin (Agustini, 2021).

Lebih jauh, dalam kondisi pandemi yang serba tidak pasti ini, ada indikasi kuat bahwa kelompok ekstremis memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyebarkan informasi palsu (hoax) dan kebencian antar kelompok masyarakat dan negara (Naseer, 2020; Avis, 2020). Sementara itu, kalangan pelajar, dengan ketergantungan pada sarana internet, membuat mereka rentan terpapar narasi-narasi ekstremisme kekerasan (Naseer, 2020). Sebagai respons atas konteks tersebut, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk melakukan penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program CONVEY Indonesia yang bertujuan mempromosikan moderasi beragama dengan fokus pada institusi pendidikan untuk penguatan stabilitas sosial dalam konteks pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi moderasi beragama di SMA dan MA, bagaimana sikap dan perilaku moderasi beragama di kalangan guru dan siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya kegiatan ini juga berupaya untuk menyusun model pengembangan kapasitas yang sesuai untuk mendorong implementasi moderasi beragama.

Metodologi

Kegiatan ini secara spesifik memberikan perhatian pada moderasi beragama di lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) dengan fokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas institusi. Untuk dapat mengembangkan kapasitas tersebut, dibutuhkan pengetahuan menda-

sar terhadap pemahaman akan moderasi beragama. Oleh karena itu, kegiatan ini didahului oleh sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus (*mixed-method*): kuantitatif dalam bentuk survei dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian ini mengambil sampel di 8 SMA dan MA baik negeri maupun swasta di wilayah Tangerang dan Tangerang selatan. Sekolah dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan dan diskusi bersama Kantor Perwakilan Kementerian Agama Kota Tangerang dan Tangerang Selatan serta Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Pengambilan data survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner online terfasilitasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis validitas dan reliabilitas terhadap item-item yang ada sekaligus mengeliminasi jawaban dari responden yang tidak lolos dalam item *attention check* dan yang jawabannya cenderung bias normatif lewat item *social desirability scale*. Hasilnya, terdapat 573 data siswa dan 28 data guru yang berhasil diolah. Hasil dari partisipan yang tersisa dilakukan analisis kuantitatif deskriptif menggunakan *t-test* dan juga analisis regresi dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indikator moderasi beragama.

Pendekatan kualitatif mencoba menggali pemahaman civitas akademika di SMA dan MA terkait moderasi beragama, sejauh mana mereka telah mendapatkan sosialisasi moderasi beragama dan bagaimana kebijakan sekolah menguatkan moderasi beragama lewat wawancara dan FGD. Total ada 8 Kepala Sekolah dan 2 Pengawas yang berhasil diwawancara. Selain itu juga ada 65 guru dan 48 siswa yang mengikuti proses FGD. Hasil FGD ini kemudian dibuat transkrip dan dianalisis menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Kode-kode yang ada lalu dibuat kategorisasi menghasilkan tema-tema yang ditemukan dalam indikator yang ingin diukur.

Dalam mengukur moderasi beragama, Peneliti menggunakan indikator moderasi beragama yang disusun oleh Kemenag (2019) yaitu, 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti kekerasan; dan 4) akomodasi atau penerimaan terhadap budaya lokal. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran moderasi beragama di SMA dan MA, perlu diketahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi (*independent variable*), beberapa aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Pertama**, *Moral as Cooperation*, untuk melihat landasan apa yang individu anggap benar dalam bekerja sama dengan orang lain, bisa kultural atau biologis. Ada 7 jenis landasan moral yaitu: (a) kekeluargaan; (b) kelompok; (c) hubungan resiprokal; (d) kepahlawanan; (e) rasa hormat; (f) keadilan; dan (g) hak milik. **Kedua**, *Reflective Thinking*, yaitu kemampuan atau kecenderungan untuk merenungkan sebuah pertanyaan dan menolak terburu-buru menjawab secara intuitif atau ada proses telaah terlebih dahulu. **Ketiga**, kepercayaan terhadap berita bohong atau hoaks. Hal ini untuk menggambarkan seberapa percaya seseorang atau individu terhadap informasi yang mengandung berita bohong atau hoaks. **Keempat**, sosial-demografis. Aspek ini penting untuk melihat seberapa berpengaruh lingkungan dan latar belakang individu dengan menggali beberapa aspek: jenis kelamin, agama, aktivitas keagamaan dan kondisi sosial di wilayah tinggal. **Kelima**, *Ambivalence Sexism*. Aspek gender merupakan aspek penting untuk melihat sejauh mana individu memberikan perhatian pada prasangka dan diskriminasi terhadap perempuan, karena bisa berupa (a) *hostile*: menganggap perempuan harus menuruti perannya secara tradisional (termanifestasi dalam bentuk kekerasan); dan (b) *benevolence*: menganggap perempuan sebagai pihak yang lemah atau kelompok yang perlu dilindungi, sehingga ada pembatasan.

Hasil Survei

Dari keempat indikator moderasi beragama yang diukur, dapat disimpulkan bahwa baik guru maupun siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki pandangan yang cukup moderat. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator yang diukur.

Siswa SMA Memiliki Komitmen Kebangsaan yang Lebih Baik daripada Siswa MA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlihat perbedaan signifikan cara pandang, sikap dan praktik beragama antara siswa SMA dan MA yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme (P value uji beda = <0.001 , $\alpha=5\%$). Siswa SMA cenderung memiliki sikap lebih moderat dibandingkan siswa MA. Walaupun berbeda signifikan, Komitmen Kebangsaan siswa SMA dan MA sama-sama tergolong moderat.

Berdasarkan jenis kelamin, secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berdampak pada komitmen kebangsaan antara siswa laki-laki dan perempuan (P value uji beda = 0.728 , $\alpha=5\%$). Komitmen kebangsaan Siswa laki-laki dan perempuan tergolong moderat. Akan tetapi, Komitmen Kebangsaan siswa SMA ternyata relatif bervariasi yakni siswa perempuan cenderung lebih moderat dibandingkan siswa laki-laki.

Hasil uji statistik menunjukkan ada beberapa faktor yang terbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk Komitmen Kebangsaan siswa SMA dan MA. Pertama, variabel *Moral as Cooperation* terutama pada dimensi kelompok, kepatuhan, keadilan, *property* dan kepahlawanan signifikan berhubungan dengan

terbentuknya cara pandang, sikap dan praktik keberagaman siswa SMA dan MA yang berdampak pada komitmen kebangsaan mereka. Kemudian, variabel Respon Terhadap Hoaks juga terbukti berhubungan signifikan dengan komitmen kebangsaan siswa. Semakin tinggi respon terhadap hoaks, maka semakin rentan cara pandang, sikap dan praktik keberagaman mereka. Terakhir, pandangan yang merefleksikan ketidakadilan pada seseorang terutama wanita yang dilakukan secara halus (*Binovelent Sexism*), pada penelitian ini terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong siswa memiliki kerentanan dalam cara pandang, sikap dan praktik keberagaman yang berdampak pada komitmen kebangsaan mereka.

Siswa SMA lebih toleran dalam mengekspresikan perbedaan dibandingkan siswa MA

Ada perbedaan signifikan antara sikap siswa SMA dan MA dalam memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang mereka yakini (P value uji beda = <0.001 , $\alpha=5\%$). Walaupun berbeda, namun rata-rata skor kedua kelompok siswa ini masih dikategorikan moderat. Sikap toleran juga ditinjau berdasarkan jenis kelamin siswa. Berdasarkan uji statistik diketahui tidak ada perbedaan signifikan rata-rata skor Toleransi antara kelompok siswa laki-laki dan perempuan (P value uji beda = 0.146 , $\alpha=5\%$). Dapat dikatakan cara pandang, sikap dan praktik yang mengekspresikan perbedaan dalam kehidupan beragama antara siswa laki-laki dan perempuan bisa dikatakan sama.

Berdasarkan hasil analisis statistik, faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi antara lain, variabel *Moral as Cooperation* terutama pada dimensi kelompok, dan *property*, serta variabel Respon Terhadap Hoaks terbukti signifikan berhubungan dengan terbentuknya ca-

ra pandang, sikap dan praktik keberagamaan siswa SMA dan MA dalam mengekspresikan perbedaan, pendapat, keyakinan dan praktik kehidupan beragama. Sikap toleransi siswa juga berhubungan dengan cara pandang mereka pada orang lain terutama wanita yang dilakukan secara halus (Benovelent Sexism), terbukti signifikan mempengaruhi tingkat toleransi siswa.

Siswa Perempuan Lebih Anti Terhadap Kekerasan daripada Siswa Laki-Laki

Hasil uji survei menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan rata-rata skor anti kekerasan antara siswa SMA dan MA (Pvalue uji beda = 0.114, $\alpha=5\%$). Dapat dikatakan sikap anti kekerasan antara siswa SMA dan MA sama. Rata-rata skor anti kekerasan pada siswa SMA dan MA tergolong moderat, walaupun ada beberapa siswa yang memiliki skor anti kekerasan yang masih tergolong rentan. Penelitian ini juga membuktikan ada perbedaan signifikan rata-rata skor sikap anti kekerasan antara siswa laki-laki dan perempuan (Pvalue uji beda = <0.001 , $\alpha=5\%$). Data menunjukkan bahwa siswa perempuan lebih anti terhadap kekerasan daripada siswa laki-laki. Fenomena ini terlihat pada kedua jenis sekolah baik SMA maupun MA.

Variabel *moral as cooperation* terutama pada dimensi keluarga, kelompok, dan kepahlawanan signifikan berhubungan dengan sikap anti kekerasan sebagai dampak dari cara pandang, sikap dan praktik keberagamaan siswa SMA dan MA. Sikap anti kekerasan pada siswa juga berhubungan dengan faktor *cognitive reflection*. Kemampuan *cognitive reflection* siswa dapat mendorong mereka untuk menganulir respons pertama dari pikiran yang sering kali salah dan mengaktifkan mekanisme kognitif yang memungkinkan siswa untuk menanggapi, mengambil keputusan, atau melakukan tindakan tertentu secara lebih reflektif dan benar. Dengan demikian, apabila siswa memiliki kemampuan *cognitive reflection*, kekerasan terhadap orang lain atas nama agama dapat dihindari. Selain

variabel *moral as cooperation* dan *cognitive reflection*, variabel respon terhadap hoaks juga terbukti berhubungan signifikan dengan sikap anti kekerasan yang dimiliki siswa.

Siswa SMA Lebih Dapat Menerima Budaya Lokal yang Diakomodasi dalam Praktik Keagamaan dibandingkan Siswa MA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA dan MA yang diteliti memiliki cara pandang yang berbeda signifikan terhadap praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi (Pvalue uji beda = 0.001, $\alpha=5\%$). Siswa SMA lebih moderat terhadap penerimaan budaya lokal yang diakomodasi dalam praktik keagamaan dibandingkan siswa MA. Walaupun berbeda, namun skor kedua kelompok siswa tersebut masih tergolong moderat. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin dapat dikatakan tidak berbeda signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan (Pvalue uji beda = 0.473, $\alpha=5\%$). Rata-rata skor Penerimaan Budaya Lokal siswa laki-laki dan perempuan masuk dalam kategori moderat, walaupun ada beberapa siswa yang cenderung masuk kategori rentan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap budaya lokal dalam praktik keagamaan berdasarkan uji statistik adalah, antara lain variabel *moral as cooperation* terutama pada dimensi kelompok, kepatuhan, dan *property*, variabel respon terhadap hoaks, serta *cognitive reflection*.

Belum Adanya Sosialisasi Moderasi Beragama di Lingkungan SMA dan MA

Diskusi dengan para guru dan pengurus sekolah di SMA dan MA menemukan bahwa belum adanya kegiatan sosialisasi dengan tema “Moderasi Beragama” yang menargetkan mereka. Para kepala sekolah, pengurus sekolah dan guru justru mendapatkan sosialisasi moderasi beragama dari lembaga lain. Untuk jenjang SMA, moderasi beragama banyak digaungkan oleh lembaga non-Pemerintah seperti Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dan ormas seperti PBNU, Muhammadiyah dan MUI (FGD, 2021).

Sedangkan untuk jenjang MA, para pengurus dan guru memahami moderasi beragama melalui informasi yang dimasukkan dalam sambutan dari Pejabat Kemenag dalam acara Kemenag dengan tema lain serta informasi yang mereka dapatkan dari internet atau media massa lain (FGD, 2021). Peneliti menemukan bahwa guru di madrasah swasta yang tidak aktif pada acara Kemenag, memiliki *awareness* mengenai moderasi beragama yang lebih rendah dibanding paparan guru MA negeri. Pada kalangan siswa, walau belum ada kegiatan sosialisasi, mereka telah mengikuti banyak kegiatan bertema moderasi beragama.

“... Sebetulnya belum ada program, Kak. Kalau kemarin itu hanya ada lomba dari Kemenag menawarkan itu (Duta Moderasi Beragama) kepada sekolah untuk mengikuti lombanya. Waktu itu saya sempat menjadi perwakilan.” (Siswa MA, 2021)

Guru Perlu Panduan dalam Mengajarkan Moderasi Beragama di Kelas

Guru sebagai agen, erat kaitannya dengan menguatkan moderasi beragama dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut diskusi para guru,

moderasi beragama sangat selaras dengan pendidikan karakter yang sudah guru sisipkan dalam kurikulum 2013. Di dalam pendidikan karakter, tiap mata pelajaran mempunyai Kompetensi Inti (KI) yang ingin dicapai. Terkait moderasi beragama sebenarnya sesuai dengan KI1 yaitu kompetensi religius dan KI2 kompetensi sosial (Pengawas Sekolah, 2021). Selain itu dalam pendidikan karakter, toleransi juga menjadi nilai yang ditekankan dalam mata pelajaran.

“Ini kalau menurut pandangan saya ya. Sebenarnya dari awal itu, kalau kita bikin RPP atau apa sudah diperkenalkan tuh. Kemampuan dalam abad 21, kan di antaranya kecakapan dalam hal berkarakter, selain literasi, mbaca, dan lain sebagainya. Cuma ada salah satunya kecakapan dalam berkarakter, dalam berkarakter sebenarnya sudah mulai perkenalkan itu kita usahakan itu Islam wasathiyah itu.” (Guru MA, 2021)

Dalam FGD (2021) juga ditemukan bahwa ada beberapa materi dalam mata pelajaran yang sangat berkaitan dengan nilai moderasi beragama menurut guru dan siswa seperti Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Kristen dan Hindu, PPKN dan Sosiologi pada jenjang SMA. Di Jenjang MA ada mata pelajaran Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Quran Hadits, dan PPKN (FGD, 2021). Walau begitu, guru juga menyadari masih ada potensi materi dalam pelajaran agama, seperti materi jihad dalam sejarah kebudayaan Islam yang berpotensi disalahgunakan dalam memahami ajaran agama (FGD Wakil Kamad, 2021). Di materi yang sensitif seperti ini akan kembali ke pemahaman guru dalam menjelaskan ke siswa. Ada baiknya jika ada keseragaman panduan dalam penekanan poin-poin dalam menyampaikan materi sensitif.

Walau dalam struktur kurikulum dan konten mata pelajaran sudah mendukung terkait penguatan moderasi beragama, pada implementasinya, masih ada kekurangan dalam penggunaan metode pembelajaran. Dalam menyampaikan

materi, mayoritas guru mengaku menggunakan metode penguatan dengan ceramah dan pemberian nasihat, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dalam ceramahnya, guru bisa mengaitkan dengan contoh sehari-hari yang menguatkan nasihat yang disampaikan dan membuat siswa lebih paham (Siswa, 2021). Namun ada siswa yang menilai jika pembelajaran tersebut cenderung monoton dan tidak *relate* dengan kehidupan mereka sehingga tidak efektif dalam menanamkan kompetensi spiritual dan sosial yang ingin ditanamkan. Selain itu, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga membuat proses diskusi antara siswa dan guru berkurang. Siswa merasa tidak diberi kesempatan untuk mendalami materi dan menyinkronkan pemahamannya dengan guru.

“Menurut saya sendiri sih kurang efektif kak, karena kan kalau misalkan spiritual gitu kan harus ada action-nya juga ya kak. Kalau misalkan sekarang itu cuma dikasih link YouTube contoh-contoh nilai spiritual dan sosial di mata pelajaran PPKN itu cuma disuruh nerapin tapi nggak dikasih contohnya dulu kak. Kayak gitu sih kak.” (Siswa, 2021)

Metode ceramah atau penguatan dengan nasihat yang disisipkan dalam mata pelajaran menjadi metode yang paling sering disebutkan oleh guru. Hanya sedikit guru yang menggunakan metode *student centered learning* dalam proses pembelajaran untuk menguatkan nilai moderasi beragama. Beberapa guru yang menggunakan metode ini seperti studi kasus dan *problem based learning*, biasanya menggunakan isu sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut guru, metode ini lebih banyak memberikan respon positif dari siswa karena siswa lebih bersemangat dan aktif dalam proses pembelajaran (Guru, 2021). Salah satu cara dalam meningkatkan efektivitas penyisipan moderasi beragama dalam mata pelajaran adalah dengan menghubungkan materi yang dipelajari dengan isu sosial keseharian dan memberikan contoh konkrit dalam perilaku

sehari-hari siswa. Jadi tidak hanya sekedar tahu atau *knowledge* saja, tetapi sudah sampai pada ranah afektif dan psikomotor dari nilai yang ingin ditanamkan.

“Nah, kalau tentang nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan itu pasti semuanya tahu karena semuanya itu kan diajarkan. Nah, yang selanjutnya itu paham... nah, di paham ini hanya beberapa orang saja yang bisa sampai di tingkat ini. Nah, yang terakhir itu implementasi atau penerapan. Nah, menurut saya yang kurang itu di bagian ketiga ini, implementasi atau penerapan. Yang sering membuat kita lupa tentang pelajaran itu karena tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelajaran itu hanya nempel di otak, hanya menjadi gagasan, adanya langkah nyata. Nah, mungkin karena di sekolah tidak ada wadah untuk menampung dari... apa... penerapan itu.” (Siswa, 2021)

Panduan praktis bagaimana guru mengajarkan nilai moderasi beragama dengan metode pembelajaran yang lebih melibatkan siswa sangat diperlukan. Terkait dengan implementasi dalam konteks perilaku/psikomotor, konteks pandemi dan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) serta PJJ ini juga membuat tantangan baru untuk guru yaitu kesulitan bagi guru dalam menilai sikap/afektif/perilaku siswa yang tidak optimal karena keterbatasan interaksi.

Siswa Belum Dibekali Cara Merespon Informasi di Internet

Proses pembelajaran dalam pandemi erat kaitannya dengan penggunaan internet, baik sebagai media pembelajaran maupun sumber belajar bagi siswa. Dalam PJJ atau PTM, siswa menggunakan fasilitas seperti *Google Classroom* dalam mengakses sumber belajar atau tugas dari guru. *Google Meet* atau *Zoom* digunakan siswa untuk menghadiri kelas online. Selain itu, siswa

menggunakan Instagram, YouTube dan Google dalam mencari materi pelajaran atau jawaban dari tugas yang diberikan. (Siswa, 2021).

Ada tiga respon berbeda dari guru terkait penggunaan internet dalam pembelajaran, yaitu:

1. Guru yang mendorong siswa untuk mencari sumber pembelajaran dari internet namun harus memperhatikan kredibilitas sumbernya;
2. Guru menggunakan sumber tambahan internet namun membatasi pencarian siswa dengan membagikan langsung materi video/website yang sesuai dengan materi yang disampaikan;
3. Guru yang menekankan ke siswa untuk hanya menggunakan buku acuan tanpa internet.

Secara umum, guru memahami jika siswa bisa dengan bebas mencari tahu informasi via internet mengenai mata pelajaran dan lainnya. Guru juga menyadari adanya ancaman bagi siswa dalam menerima disinformasi. Bahkan guru juga menyatakan bahwa dalam internet, siswa lebih mudah terpapar ajakan-ajakan dalam melakukan tindak kekerasan, terutama ajakan dari sosial media.

Tidak hanya guru, siswa juga sudah menyadari adanya ancaman ini. Pada siswa, mayoritas baru mengecek kebenaran informasi yang diterima jika dirinya berkepentingan dengan informasi tersebut. Dari hasil FGD siswa, banyak siswa menekankan jika dirinya akan mencari tahu kebenaran informasi yang dia terima dengan membaca dulu informasi yang diterima sebelum disebarkan, mengecek informasi yang didapat dengan Google atau sosial media serta mengecek dengan menggunakan link domain tempat informasi. Siswa juga bertanya mengenai informasi yang diterima pada orang-orang di sekelilingnya seperti orang tua, anggota keluarga bahkan guru ngaji jika terkait agama. Uniknya, Siswa juga mencari pendapat dari orang-orang yang dianggap ahli seperti ustadz yang mempunyai account di sosial media atau

di YouTube dan mencari pembahasan mengenai informasi yang diterima.

Guru sebagai agen penguatan moderasi beragama, juga menjadi tempat siswa untuk bertanya mengenai informasi yang didapat, terutama terkait informasi keagamaan. Guru menjadi tempat aduan ketika siswa menerima informasi yang memprovokasi dan juga tempat siswa memvalidasi apakah berita tersebut benar atau tidak (FGD, 2021). Sebagian guru juga sudah memahami perannya dalam mendorong pengecekan informasi yang didapat di siswa, apalagi di saat PJJ dan kemajuan teknologi, siswa mudah mencari dan mendapat informasi yang didapat. Lagi, dorongan tersebut disampaikan dalam bentuk nasihat atau ceramah dalam pembelajaran. Banyak guru mengaku tidak menyiapkan panduan bagi siswa dalam mencari informasi dari internet, khususnya ketika mencari informasi tentang mata pelajaran yang diampu. Bahkan ada guru yang merasa siswa yang diajar sepertinya belum dirasa butuh dibekali bagaimana cara merespon informasi, karena jenjang SMA/MA dianggap pemikirannya masih sederhana, yang dirasa belum butuh internet dalam menganalisis suatu materi dalam pembelajaran.

Capacity Building dan Technical Assistance

Berdasarkan temuan *baseline* dapat dilihat bahwa peningkatan kemampuan untuk mencegah disinformasi (*hoaks*) tak hanya berhenti tentang kapasitas literasi, tetapi juga berhubungan dengan moderasi beragama yang dimiliki seseorang. Lebih jauh, temuan *baseline study* juga menunjukkan bahwa meski para guru belum mendapatkan sosialisasi mengenai konsep moderasi beragama secara formal, guru adalah aktor krusial dalam menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah, utamanya lewat mata pelajaran yang dinilai dapat menyisipkan

nilai karakter. Hanya saja yang menjadi tantangan seiring dengan meningkatnya penggunaan internet pada proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka, masih tampak kesulitan para guru dalam memilah mana informasi yang kredibel dan mana yang merupakan disinformasi. Hal ini menjadi penting karena dalam temuan tampak bahwa jarang sekali guru yang memberikan panduan bagi siswa dalam menelaah paparan informasi yang siswa dapatkan di internet, sementara guru merupakan salah satu sumber yang akan ditanya siswa ketika menerima informasi yang meragukan.

Berdasarkan temuan ini, sebagai tindak lanjut dilakukan *capacity building* dalam bentuk *workshop* pencegahan disinformasi dengan melibatkan guru-guru di SMA/MA tempat *baseline* dilakukan. *Workshop* menggunakan pendekatan *experiential learning* dengan dasar belajar Kolb. Sementara untuk basis teoretik intervensi yang digunakan memakai *Theory of Psychological Inoculation* dan *The pro-truth pledge*. *Theory of Psychological Inoculation* adalah pendekatan yang dikenal sebagai *prebunking*. *Prebunking* mencoba untuk menjelaskan bagaimana orang dapat menolak persuasi atas informasi yang salah. Berdasarkan teori inokulasi, pendekatan ini menggunakan analogi imunisasi biologis. Sama seperti paparan yang lemah terhadap patogen yang akan memicu produksi antibodi, teori inokulasi menyatakan bahwa secara pre-emptif jika orang dipaparkan pada argumen persuasif yang lemah akan membangun resistensi orang terhadap manipulasi di masa depan (Linden, et al., 2020; Roozenbeek & Linden, 2020). Sementara pada riset *The pro-truth pledge* ditemukan bahwa pengambilan janji/komitmen untuk selalu melakukan perilaku-perilaku yang berasosiasi terhadap pencegahan penyebaran disinformasi seperti (1) membagikan kebenaran, (2) menghormati kebenaran, dan (3) mendorong kebenaran meningkatkan perilaku aktual yang dijanjikan (Tsipursky, 2018).

Workshop dilakukan sehari penuh secara luring pada tanggal 29 November 2021 yang

dihadiri 16 orang guru dari 8 SMA dan MA tempat *baseline study* dilakukan. *Workshop* terbagi menjadi tiga sesi yaitu: 1) pengantar moderasi beragama; 2) membedakan informasi benar dan palsu; dan 3) peningkatan kemampuan literasi siswa dengan *student centre learning*. Sesi (1) dilakukan sebagai respon bahwa sebagian guru belum mendapatkan sosialisasi mengenai pengertian moderasi beragama. Hal ini juga diperlukan untuk dilakukan di awal *workshop* sebagai pencegahan kesalahpahaman dan menyamakan perspektif dalam isu ini. Sesi kedua peserta diajak untuk merasakan sendiri bagaimana merancang dan membuat berita palsu sehingga bisa mendeteksi secara mandiri aspek-aspek yang terdapat dalam suatu berita palsu. Sementara di sesi terakhir, peserta didorong untuk menggunakan pendekatan *student centre learning* dalam penguatan kemampuan literasi siswa. Sebagai tindak lanjut kegiatan, masing-masing peserta diminta untuk membuat rancangan aksi di sekolah dalam rangka penguatan dari ancaman disinformasi baik kepada kolega guru dan juga kepada siswa.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan kegiatan *capacity building* yang dilakukan, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang ditawarkan terkait dengan penguatan moderasi beragama di jenjang SMA dan MA:

1. Diperlukan adanya Intensifikasi sosialisasi Moderasi Beragama kepada guru dan kepala sekolah/madrasah.
2. Perlu adanya panduan dan pelatihan bagi guru untuk menyisipkan nilai moderasi beragama lewat pembelajaran aktif (*student centered learning*) pada Pembelajaran Tatap Muka yang bisa disediakan oleh Kemenag atau Kemendikbudristekdikti.
3. Perlunya penyediaan panduan bagi guru untuk dapat menyisipkan metode penelaahan informasi dalam mata pelajaran yang bisa diajarkan ke siswa.

Daftar Pustaka

- Agustini, P. (2021, May 3). Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 dan Vaksin. *Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Aptika Kominfo)*. Diakses pada <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-vaksin/>
- Azra, A. (2015). Civic Education at Public Islamic Higher Education (PTKIN) and Pesantren. *TARBIYA: Journal of Education In Muslim Society*, 2(2), 167-177. doi:10.15408/tjems.v2i2.3186.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Penulis
- Dany, F.W.W. (2021, Februari 9). Pandemi Memperbesar Peluang Putus Sekolah. *Kompas*. Diakses pada <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/02/09/pandemi-memperbesar-peluang-putus-sekolah/>
- Hafez, M.M. (2003). *Why Muslims Rebel: Repression and Resistance in the Islamic World*. Colorado: Lynne Rienner Publisher
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam*. Oxfordshire: Princeton University Press
- Kamali, M.,H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam*. New York: Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (1995). *Multi cultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. New York: Clarendon Press.
- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Narhetali, E., Ronny., Pratama, A.J., & Akhyar, M. (2019). *Protokol Sekolah dan Madrasah RANGKUL: dalam Mengenal dan Merespon Tanda-Tanda Rentan Ekstremisme Kekerasan di Sekolah dan Madrasah*. Tangerang Selatan: PPIM UIN Jakarta
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The search for a new ummah*. USA: Columbia University Press.
- Roozenbeek, J., van der Linden, S. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Palgrave Commun*, 5, 65.
- Supriadin, J. (Februari 17, 2021). 380 Santri Terpapar Covid-19, Pesantren di Kota Tasikmalaya Jadi Klaster Baru. *Liputan6.com*. diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/4484841/380-santri-terpapar-covid-19-pesantren-di-kota-tasikmalaya-jadi-klaster-baru>
- Tsipursky, G., Votta, F., & Roose, K. M. (2018). Fighting fake news and post-truth politics with behavioral science: The Pro-Truth Pledge. *Behavior and Social Issues*, 27, Article 47-70. <https://doi.org/10.5210/bsi.v27i0.9127>
- Yunita. (2017, Januari 19). Ini Cara Mengatasi Berita “Hoaks” di Dunia Maya. *Kominfo.go.id.*, Diakses pada https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoaks-di-dunia-maya/0/sorotan_media
- van der Linden, S., Roozenbeek, J., & Compton, J. (2020). Inoculating Against Fake News About COVID-19. *Front. Psychol.*, 23 October 2020. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566790>
- Wildman, W.J., Bulbulia, J., Sosis, R., & Schjoedt, U. (2020). Religion and the COVID-19 pandemic. *Religion, Brain & Behavior*, 10(2), 115-117, <https://doi.org/10.1080/2153599X.2020.1749339>



Promoting Religious Moderation, Focusing on Education to Strengthen Social Stability in Indonesia
in the Context of COVID-19- CONVEY Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No.5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | Email: pmu.convey@gmail.com
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:

